

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN
MEASLES RUBELLA
(Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar

Oleh

NUR KHAERA
NIM. 10300115110

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur khaera
NIM : 10300115110
Tempat/Tgl.Lahir : Soppeng, 10 April 1997
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN. A. Tonro Gowa
Judul : Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar
Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin
Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi
Hukum dan Masalah Mursalah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Juli 2019

Penyusun,


NUR KHAERA
NIM.10300115110

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA ANALISIS PERBANDINGAN SOSIOLOGI HUKUM DAN MASLAHAT MURSALAH", yang disusun oleh NUR KHAERA, NIM: 10300115110, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munasqiyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 M, bertepatan dengan 14 Dzulkaedah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Juli 2019 M

19 Dzulkaedah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (.....)

Munasqiy I : Dr. Achmad Musyuhid Idrus, S.Ag., M.Ag. (.....)

Munasqiy II : Dr. Abdi Wijaya, SS., M.Ag. (.....)

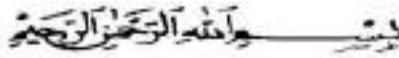
Pembimbing I : Dr. H. Muazzam Muh. Bakri, Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Dr. H. Abd. Wahid Huddade, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP.196210161990031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt karna berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa menghirup udara di atas pijakan bumi dan di bawah kolom langit yang terhampar luas ini, sungguh mulia Allah swt. menciptakan alam dan segala isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang patut kepada-Nya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan sehingga kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur dan termasuk hamba yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Rasulullah saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberi petunjuk serta kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum & Maslahat Mursalah" ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Melalui kesempatan ini, dengan segala cinta dan kasih, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Drs. H. Abd. Muis** dan ibunda **Hj. Hasnah S.Sos** yang penuh kesabaran dan kebesaran hati atas segala yang telah dilakukan demi penulis, yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Terimakasih pula kepada saudara-saudaraku **Rizkiyani S.Pd dan Hikmayani S.Pd**, yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat bagi penulis semoga, Allah SWT selalu merahmati kalian semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi kerja keras serta doa , usaha, semangat dari keluarga dan sahabat, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Achmad Musyahid, M,Ag** selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

4. Bapak **Dr. Muammar muh. Bakry, Lc., M.Ag** selaku pembimbing I dan **Dr.H.Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI** selaku pembimbing II. Terimah kasih atas kesabaran dan kesedian beliau dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, berupa tenaga serta pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag** selaku penguji I dan Bapak **Dr. Abdi Wijaya, SS., M.Ag** yang memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis.
6. Seluruh **Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum** serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan dari amal yang telah dilakukan.
7. Semua instansi terkait skripsi penulis yang telah bersedia membantu dan memberikan data yang valid kepada penulis, baik dari **Staf kantor Camat Tallo, Petugas Puskesmas Jumpandang Baru, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo**. Terimah kasih telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2015 (**Justice**) serta terkhusus kepada teman-teman kelas **PMH C**. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

9. Untuk saudara-saudaraku (eleven peoples Chiby-chibyku) yaitu: **Ahyani, Rasna, Feby, Nely, Sita, Aul, Riri, Widya, Indah, Yulfa, Uli.** Terima kasih atas ukiran hati bertemakan persahabatan dan pertemanan yang tulus atas waktu yang telah dihabiskan bersama penulis, yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, melantumkan doa serta atas rasa kekeluargaan yang begitu besar tanpa ikatan darah.
10. Kepada Sahabat sekaligus saudaraku dari SMAN 3 Watan Soppeng yaitu **Selvi Lestari, Afrah Ayu Rachmuna, Lutfia Erbi Putriani, Lutfiah Syam,** yang telah membantu baik berupa pemikiran dan semangat kepada penulis.
11. Kepada seluruh **Demisioner Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum 2018,** yang telah memberikan sumbangsi berupa dukungan dan semangat.
12. Kepada seluruh keluarga besar **Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng,** yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman PPL di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, **Chika, Yani, Feby, Fia, Anna, Sarah, Hera, Fikar, Ery, Yulfa, Mila, Vira, Uga dan Bella.** Terimah kasih telah menjadi partner, dan senantiasa mendukung dan memberi semangat.
14. Kepada semua saudara-saudaraku KKN angkatan 60 di Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba : **Rini, Ifa, Eva, Mira, Isti, Khalijah, Ummi, Agus, Sultan, Shaum.** Terimah kasih untuk sejuta memori, kenangan manis, dan banyak cerita, izinkan aku untuk selalu

merindu,sampai nanti kembali bersua. Sejauh apapun kaki melangkah, selalu ada alasan kembali untuk sebuah pengabdian. Terimah kasih untuk semangat yang diberikan, dan cerita yang penuh moment, kalian tidak akan pernah terlupakan.

15. Kepada **Guru dan siswa SD 335 Kacibbo, SD 97 Sampeang, SD 84 Pangi-pangi.** Terimakasih telah memberi pelajaran dan pengalaman sehingga saya bisa menjadi sosok manusia yang hadir untuk menuai pengalaman yang saya miliki.
16. Kepada informan yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi kepada penulis.
17. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, berupa moril maupun materil yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi. Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal disisi Allah swt.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah swt memberikan imbalan yang berlipat ganda atas segala bantuannya yang tulus kepada penulis. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan karena kesempurnaan hanya milik sang khalik. Semoga setiap kritikan yang membangun akan menjadikan penulis lebih baik kedepannya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 29 Juli 2019

Penulis

Nur Khaera

NIM : 10300115110

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Tinjauan Umum Fatwa.....	13
1. Definisi Fatwa	10
2. Landasan Fatwa.....	15
3. Kode Etik Fatwa	17
4. Urgensi Fatwa dalam kehidupan umat Islam.....	21
5. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan fatwa.....	22
6. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	24

B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia	25
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	25
2. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam Berfatwa	27
3. Peran Majelis Ulama Indonesia	27
4. Fungsi Majelis Ulama Indonesia	28
C. Tinjauan Umum Tentang Vaksin Measles Rubella	29
1. Gambaran Penyebaran Campak dan Rubella di Indonesia	29
2. Pengertian Vaksin Measles Rubella	30
3. Bahaya dan Gejala Penyakit Campak dan Rubella	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Persepsi Masyarakat Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella	44
C. Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68

B. Implikasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Tabel 3.1 Bagan Teknik Analisis Data

Tabel 4.1 Luas wilayah Kota Makassar

Tabel 4.2 Sebaran dan kepadatan penduduk

Tabel 4.3 Luas areal jumlah RT/RW, RTG, dan penduduk Kecamatan Tallo

Tabel 4.4 Data Sarana Kesehatan Se-Kecamatan Tallo



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian

Gambar 4.2 Bahaya penyakit Campak dan Rubella



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلْدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينُ الله

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ الله hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naẓr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : Nur Khaera

NIM : 10300115110

JUDUL SKRIPSI : Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan vaksin *Measles Rubella* Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah. Permasalahan ini dibagi menjadi dua sub pembahasan yaitu : 1) Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin *Measles Rubella*, 2) Bagaimana analisis perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Teologis Normatif, Sosiologis, dan Fenomonologis. Data yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Tallo, Petugas Kesehatan Jumpandang baru dan Tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen, serta literatur-literatur dan referensi yang berkaitan. Teknik pengolahan data dan analisis data terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* yang merupakan produk dari *Serum Institute of India* (SII), secara langsung memberikan pengaruh serta menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat. 2) Kemaslahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin *Measles Rubella* adalah menjaga jiwa , yang menjadi salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (*ad-daruriyyat al-khams*). MUI mempertimbangkan di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyariatkannya hukum Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya kejelasan hukum mengenai penggunaan vaksin *Measles Rubella*, sehingga masyarakat tidak ragu dan mempersoalkan kehalalan vaksin tersebut, serta perlunya upaya pemerintah untuk menemukan vaksin yang halal, sehingga tidak ada pro kontra yang terjadi di masyarakat, selain hal tersebut antara Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia harus bersinergi dalam mensosialisasikan program Imunisasi vaksin *Measles Rubella* secara massif, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat yakin dan percaya, dan peningkatan di semua lini dengan memanfaatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara praktis umat Islam senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan dan permasalahan, yang senantiasa berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang dialaminya. Di sisi lain umat Islam secara sadar harus tetap menjadikan agama sebagai sandaran pokok dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan adanya upaya memberikan jawaban agamis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, maka fatwa merupakan institusi yang sangat cocok untuk memberikan jawaban.

Oleh karena permasalahan yang dihadapi umat Islam sangat kompleks dan menyangkut berbagai bidang, sementara bidang-bidang keilmuan semakin spesifik, sehingga penguasaan bidang-bidang keilmuan sangat tidak memungkinkan dikuasai oleh satu orang saja. Kondisi inilah yang menjadikan pentingnya pemberdayaan lembaga-lembaga fatwa sebagai tempat berkumpulnya semua ahli-ahli, yang tentu saja bukan hanya ahli agama, tetapi juga ahli-ahli bidang lainnya.

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan yang dialami oleh umat muslim tersebut menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan karena problem sosial masyarakat senantiasa berjalan, terus sementara nas-nas yang dijadikan dasar sangat terbatas adanya.¹

¹Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010* (Cet. I; Yogyakarta, 2015), h. 113.

Permasalahan yang muncul meningkat tajam dan semakin kompleks perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel, untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Hal ini penting agar umat Islam tidak menjauhkan mereka dari agama, tetapi justru fenomenanya masalah tersebut mendekatkan mereka kepada ajaran Islam, untuk mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat muslim tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam meskipun semangat keagamaan mereka tinggi. Oleh karena itu, semangat yang baik dari umat Islam ini perlu segera ditanggapi oleh para ulama yang tentunya memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim.

Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang memiliki tanggung jawab untuk membina, membimbing kaum muslim di seluruh Indonesia. Tugas lain dari MUI adalah membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan sebuah produk makanan, penentuan kebenaran aliran dalam Islam dengan lingkungannya.

Fatwa berarti petuah, nasihat dan jawaban atas pertanyaan hukum. Fatwa juga dapat berarti pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atas jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Karena itu, si peminta fatwa baik perorangan maupun lembaga tidak harus mengikuti penetapan hukum seorang mufti di suatu tempat karena aspek sosiologis yang mengitari penetapan hukum fatwa tersebut berbeda.

Selain itu karena fatwa cenderung dinamis dalam mengikut perkembangan baru yang dihadapi masyarakat peminta fatwa.²

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah yang berkaitan dengan keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa MUI adalah suatu masalah keagamaan yang telah di setujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi. Di Indonesia lembaga yang berhak dan berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) yang merupakan produk dari *Serum Intitute Of India* (SII) untuk Imunisasi.

Vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah jenis Imunisasi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari dua penyakit sekaligus, campak (*Measles*) dan campak Jerman (*Rubella*). Sejatinya, vaksin MR merupakan bagian dari vaksin MMR (*Measles, Mumps, Rubella*), tapi di Indonesia vaksin *Mumps* sengaja dipisahkan dari keduanya. Hal ini dilakukan karena penyakit *Mumps* atau gondongan sudah jarang ditemui dikalangan masyarakat Indonesia. Sementara itu masih sangat sering terjadi pada anak-anak. Campak Jerman juga membutuhkan perhatian ekstra apabila penderitanya adalah ibu hamil. Pada wanita yang masih hamil muda, *Rubella* dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi dalam kandungan, hingga kelainan bawaan pada bayi.

Menurut Kementerian Kesehatan, kehadiran fatwa memberikan kejelasan bagi masyarakat agar tidak ragu lagi mengikuti program vaksin MR. Program ini dilakukan semata-mata agar buah hati terhindar dari risiko terinfeksi penyakit *Campak* dan *Rubella* yang bisa berdampak pada kecacatan dan kematian. Berdasarkan data yang di publikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2015, Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah kasus *Campak* terbesar di dunia. Kementerian Kesehatan RI mencatat jumlah kasus *Campak* dan *Rubella* yang ada di Indonesia

²Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam* (Cet.I ; Alauddin University Press, 2012), h. 138.

sangat banyak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah total kasus *Campak* dan *Rubella* yang dilaporkan antara tahun 2014 sampai dengan Juli 2018 tercatat sebanyak 57.056 kasus, (8.964 positif *Campak* dan 5.737 positif *Rubella*). Lebih dari tiga perempat dari total kasus yang dilaporkan, baik *Campak* 89% maupun *Rubella* 77% diderita oleh anak dibawah 15 tahun.³

Penggunaan vaksin MR produk dari *Serum Institute of India* (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari Babi. Meski begitu, MUI memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut untuk Imunisasi, dengan syarat ada kondisi terpaksa dan belum ada vaksin MR yang halal. Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan atau mubah hukumnya karena ada kondisi keterpaksaan (*darurat syar'iah*) dan belum ditemukan vaksin MR halal dan suci, di dalam Al-Qur'an firman Allah swt, dalam QS Al-Baqarah/2:173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ لِّغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ ٱبَٱغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١٧٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Pelaksanaan penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) atau *Campak Rubella* di Sulawesi Selatan masih sangat rendah, capaiannya masih 48 persen anak pertanggal 13 September 2018, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan memahami tentang keputusan fatwa MUI tentang

³Benedikta Desideria, "Fatwa MUI Soal Vaksin MR Hapus Keraguan Masyarakat untuk Imunisasi" (Liputan), <https://www.liputan6.com/health/read/3626104/fatwa-mui-soal-vaksin-mr-hapus-keraguan-masyarakat-untuk-imunisasi>, 15 Mei 2019.

⁴Departemen Agama Republik, *Al-Hidayah Al-Our'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Penerbit Kalim, 2010), h. 27.

penggunaan vaksin *Measles Rubella*, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum & Maslahat Mursalah”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum & Maslahat Mursalah.”

2. Deskripsi Fokus

Demi menghindari kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting, antara lain :

- a. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁵
- b. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang sudah cukup lama bekerja sama dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu, sehingga dapat mengoordinasikan dirinya, berpikir tentang dirinya, terikat oleh rasa identitas bersama, dan memiliki kebiasaan, tradisi sikap, dan perasaan persatuan yang sama.⁶

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. XII; Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), h. 880.

⁶Sunaryo, *Sosiologi* (Cet.I; Jakarta: Bumi Medika, 2015), h. 27.

- c. Fatwa adalah penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk persoalan hukum sesuatu dan hasil dari keputusan tersebut tidak mengikat peminta fatwa (*Mustafti*).⁷
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
- e. Vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah jenis Imunisasi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari dua penyakit sekaligus campak (*Measles*) dan campak Jerman (*Rubella*).
- f. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- g. Perbandingan adalah suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji.
- h. Sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.⁸
- i. Maslahat Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syarak melalui dalil yang rinci.⁹

⁷Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa: Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 14.

⁸Beni Ahmad, Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 16.

⁹Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 129.

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Persepsi	Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.
2.	Masyarakat	Masyarakat adalah sekelompok manusia yang sudah cukup lama bekerja sama dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu sehingga dapat mengkoordinasikan dirinya, berpikir tentang dirinya, terikat oleh rasa identitas bersama, dan memiliki kebiasaan, tradisi sikap, dan perasaan persatuan yang sama.
3.	Fatwa	Fatwa adalah penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk persoalan hukum sesuatu dan hasil dari keputusan tersebut tidak mengikat peminta fatwa (<i>Mustafti</i>).
4.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
5.	Vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR)	Vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR) adalah jenis Imunisasi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari dua penyakit sekaligus campak (<i>Measles</i>) dan campak Jerman (<i>Rubella</i>).

6.	Analisis	Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
7.	Perbandingan	Perbandingan adalah suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji.
8.	Sosiologi hukum	Sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.
9.	Maslahat Mursalah	Maslahat Mursalah adalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syarak melalui dalil yang rinci

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimana Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum & Maslahat Mursalah?”. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam 2 sub masalah yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) ?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah terhadap fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measless Rubella MR di Kota Makassar ?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum & Maslahat Mursalah. Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Muh Natsir, dalam bukunya *“Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan Umat (Perspektif Pemikiran Politik Islam)”*. Buku ini menjelaskan hubungan antara MUI dengan Pemerintah, Keterlibatan Pemerintah dalam pembinaan umat Islam, dan kontribusi MUI dalam menyelesaikan problem keumatan.¹⁰
2. Rahmawati, dalam bukunya *“Dinamika pemikiran Ulama dalam ranah pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*. Buku ini menjelaskan tentang MUI dan fatwa-fatwanya, Pembentukan dan Perkembangan MUI, Fungsi dan Peran MUI, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, Tinjauan umum mengenai fatwa-fatwa MUI, Fatwa-fatwa dalam bidang Pangan, Obat-obatan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.¹¹
3. Abdul Wahid Haddade, dalam bukunya *“Kode Etik Berfatwa Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan”*. Buku ini mengulas lebih

¹⁰Muh.Natsir, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan Umat Perspektif Pemikiran Politik Islam I* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4.

¹¹Rahmawati, *Dinamika pemikiran Ulama dalam ranah pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 98.

jauh dan mengelaborasi secara apik dan kompherenshif mengenai konsepsi dan kode etik fatwa keagamaan mulai dari konsep dasar dari fatwa, Mufti, Mustafti, Darul Ifta. Sistem dan prosedural fatwa keagamaan, fatwa dan perubahan sosial hingga bentuk format ideal dari perlembagaan dari lembaga fatwa pada masa sekarang.¹²

4. Makhrus Munajat dalam jurnalnya *“Imunisasi menurut kajian MUI”*. Dalam Jurnal tersebut di jelaskan bahwa Imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan, bahkan dapat dikatakan wajib jika berpegang kepada sadudzdzari’ah, Imunisasi dengan dugaan adanya campuran bahan haram, dan vaksin tersebut sudah dicuci dengan bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal dengan dasar istihlak. Apabila ada indikasi keharaman, maka hukumnya tetap boleh dengan alasan darurat dan mengambil madharat yang lebih ringan.¹³ Dalam jurnal ini tidak spesifik menjelaskan tentang maslahat mursalah dan sosiologi hukumnya, sehingga peneliti mengambil jurnal ini sebagai rujukan untuk membahas lebih lanjut mengenai Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin Measless Rubella produk dari Serum Intitute of India (SII) untuk Imunisasi.
5. Skripsi yang disusun oleh Dice Indriani dengan judul : *“Fatwa MUI 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 serta jenis Maslahah Mursalah dalam penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI No. 04

¹²Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa*, h. 11.

¹³Makhrus Munajat, *“Imunisasi menurut kajian MUI”* (Seminar Nasional yang disajikan di Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta, 14 Oktober 2017), h. 7.

Tahun 2016.¹⁴ Dalam skripsi tersebut, hanya menjelaskan dasar pertimbangan penghalalan Vaksin dan jenis Masalah Mursalnya, sehingga peneliti mengambil skripsi ini sebagai rujukan dan referensi untuk membahas dari aspek yang lain yaitu persepsi masyarakat, serta analisis sosiologi hukum dan maslahat mursalah terhadap fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin *Measless Rubella* produk dari *Serum Intitute of India* (SII) untuk Imunisasi.

Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang Fatwa MUI dalam penggunaan Vaksin namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang Persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR) Analisis perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu untuk :

1. Mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella.
2. Mengetahui analisis Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah terhadap fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella di Kota Makassar.

¹⁴Dice Indriani, "Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 41.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum Islam, pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi dan wawasan para mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut, serta dapat berguna dan bermanfaat bagi pengajar, lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti *Baths al-Masail* Nahdatul Ulama (NU) dan Tarjih Muhamaddiyah, serta seluruh masyarakat sehingga akan memberikan perspektif yang jelas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan nantinya akan turut serta memberikan andil dalam upaya menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Penelitian ini sekaligus menjadi ilmu yang sangat berarti bagi peneliti dan selanjutnya akan menjadi pengalaman di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Fatwa

1. Definisi Fatwa

Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-Fatwa*. Menurut Ibnu Manshur, kata fatwa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan.¹ Fatwa secara etimologi berarti jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam² atau penjelasan tentang sesuatu masalah hukum.³ Ibrahim *al-Fayumi* yang mengartikulasikan fatwa itu sebagai pemuda yang kuat sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dapat dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya.⁴ Jika ditelusuri secara mendalam, kata fatwa juga disebutkan di dalam Al'Quran Firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Shaffat/37:11 yang berbunyi:

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۖ

Terjemahnya:

¹Abu al-Fadl Muhammad bin Mansur, *Lisan al- 'Arab* (Cet. II; Beirut: Dar al-Shadir, 1999), h. 134.

²Ibrahim Anis, (at. al), *Al-Mu'jam al-Wasieth*, Juz II (Cet. II; Cairo: Dar al-Maarif, 1973), h. 673.

³Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa Al-A'lam* (Cet. XXIX; Beirut: Dar al-Masyriq, 1987), h. 568.

⁴Ibrahim al-Fayumi, *Qamus al-Munir* (Cet. I; Kairo: Dar al- Syuruq, 1991), h.156.

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.⁵

Dari definisi di atas, ada dua hal yang mendasar yaitu:

- a. Fatwa bersifat *responsife*, merupakan jawaban hukum (*Legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*Based on demand*).
- b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Ketentuan tidak mengikat disebutkan sebagai upaya untuk membedakan antara fatwa dengan *qaddha* (keputusan pengadilan) atau kekuasaan. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa, baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan padanya.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk persoalan hukum sesuatu dan hasil dari keputusan tersebut tidak mengikat peminta fatwa (*mustafti*). Atau dengan istilah lain bahwa fatwa adalah proses pembedaan ajaran agama atas realitas yang sedang berlangsung yang kemudian menuntut dua bentuk kepakaran dan keahlian yaitu keahlian memahami ajaran dan keahlian memahami realita.⁶

⁵Departemen Agama Republik, *Al-Hidayah Al-Our'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Penerbit Kalim, 2010), h. 477.

⁶Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa: Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.

2. Landasan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang terlebih dahulu telah dicontohkan oleh nas Alquran sebagaimana dalam QS al-Nisa/4 ayat 127 dan 176 tentang penjelasan hukum para wanita dan kalalah. Pada ayat tersebut Allah menunjukkan betapa pentingnya fatwa dalam memenuhi kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, jika seseorang mendapati sebuah kasus yang membutuhkan dalil atau penjelasan, maka wajib hukumnya untuk bertanya kepada orang yang ahli, di dalam Alquran firman Allah swt. Dalam Q.S Al-al-Nahl/16:43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.⁷

Hadis :

عن ابن عباس أن سعد بن عبادَةَ استفتى رسول الله ص الله عليه وسلم فقال
إن أُمِّي ماتت وليها نذر لم نقضه , فقال رسول الله ص الله عليه وسلم آقضه
عنها

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi saw., yaitu dia mengatakan: sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, h. 408.

Rasulullah saw menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR. Abu Daud dan Nasai)⁸

Beberapa fatwa sahabat tersebut didasarkan pada dalil-dalil nas serta hasil ijtihad mereka sendiri. Penggunaan landasan logika atau *ra'yu* dalam berfatwa dibolehkan selama logika tersebut sah dan tidak menyalahi nas. Oleh karena itu *al-Qiyas* sebagai salah satu instrumen fikih juga dibolehkan dalam fatwa.⁹ Adanya landasan nas baik dari Alquran dan Hadis serta fatwa para sahabat membuktikan bahwa fatwa merupakan proses penjelasan terhadap sebuah masalah hukum yang telah diakui keabsahannya dalam Islam.

Selain itu, fatwa telah dikenal sejak periode wahyu hingga pasca wafatnya Rasulullah saw, yang semakin menguatkan posisi fatwa sebagai salah satu otoritas penting dalam perkembangan hukum Islam. Kebolehan penggunaan logika dalam fatwa juga memberikan ruang yang lebih *fleksibel* dan *rasional* dalam berijtihad sehingga fatwa yang dihasilkan dapat diaplikasikan oleh siapa pun dan di mana pun ia berada.

Adapun yang diajukan untuk meminta fatwa adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Olehnya itu orang yang meminta fatwa disebut *mustafti*, sedangkan orang yang memberikan jawaban disebut *mufti*. Sehingga dapat dipahami bahwa unsur dari fatwa itu mengandung: *Mustafti*, *mufti*, *al-ifta* dan *fatawa*. Seperti dalam Alquran firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa al-Nahl/4:176 yang berbunyi:

اُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ
 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ

⁸Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 597.

⁹Abdul Karim Zaidan, *Usul al-Da'wah* (Cet.III; 1976), h. 157.

فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٧٦}

Terjemahnya:

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.¹⁰

3. Kode Etik Berfatwa

- a. Fatwa sangat dipengaruhi perubahan zaman, tempat, kondisi, dan tradisi masyarakat.

Dalam sejarah penulisan teoritisasi hukum, ada tiga tokoh yang sangat meneriakkan kode etik fatwa ini, yaitu : Imam al-Qaraafi, Ibnul Qayyim dan Ibnu Aabidin. Ketiga-tiganya dianggap telah mempertajam kode etik ini dengan karya-karya yang sangat monumental. Dalam bukunya *Al-Ihkam fi tamyizil Fatawa' Anil Ahkaam wa Tasarrufatil Qadi Wal Imam*, Imam al-Qaraafi telah menunjukkan bahaya kebakuan fatwa pada ijthad-ijthad ulama. Salah satu pernyataannya yang dianggap tajam menyangkut hal ini adalah:

ولا تجد على المسطور في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من غيرا
هل اقلبك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واساله عن عرف بلده واجره
عليه و افته به دون عرف بادل وامقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح و
الجمود على المنقولات ابداءضلال في الدين وجهل بمقا صد علماء المسلمين
والسلف الماضين.

¹⁰Departemen Agama Republik, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, h. 106.

Artinya:

Janganlah kamu membekukan dirimu (komitmen dengan) pada apa yang tertulis di buku-buku ulama dulu selama hidupmu. Namun yang harus kamu lakukan adalah bilamana ada orang yang mendatangimu dari sebuah daerah bukan daerahmu untuk meminta fatwa dari kamu, maka tanyakanlah tradisi daerahnya lalu berikanlah fatwa kepadanya berdasarkan tradisi daerahnya bukan berdasarkan tradisi daerah kamu, dan jangan pula berikan fatwa berdasarkan yang tertulis pada buku-buku dulu. Ketahuilah bahwa inilah sesungguhnya perilaku yang benar nan jelas, dan ketahuilah bahwa sikap yang sangat fanatic terhadap pendapat-pendapat ulama selamanya adalah sebuah kesesatan dalam agama, dan sebuah ketidak tahuan atas maksud inti dari ulama-ulama Islam.

Dalam bukunya “I’lamul Muwaqqi’in” Ibnul Qayyim membuat pasal khusus mengenai perlunya merubah fatwa karena terjadinya perubahan kondisi, tradisi, zaman, dan tempat, dengan menyertakan teori dan aplikasinya. Ibnul Qayyim menyatakan, karena ulama mengabaikan kode etik ini, maka terjadilah distorsi syariah yang berbasis masalah, juga berimbas pada terjadinya penganiayaan pada masyarakat. Salah satu pernyataan Ibnul Qayyim yang paling populer dalam hal ini adalah:

من افقى الناس بمجرد المنقول فى الكاتب على اختلف فى عرفهم وعواند هم وازمنتهم واحوالهم وقرابن احوالهم فقد ضل واضل وكانت جنا يته على الدين اعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلف فى بلد هم وعواند هم وازمنتهم وطبانعهم بما فى كتاب على اختلف بلد هم وعواندهم وازمنتهم وطبانعهم بما فى كتاب من كتب الطب على ابدانهم بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتى الجاهل اضر ما على اد يان الناس وابدانهم.

Artinya:

Barang siapa yang memberikan fatwa kepada orang hanya berlandaskan buku-buku yang tertulis tanpa melihat perbedaan tradisi mereka, perbedaan waktu, kondisi dan konteks yang melingkupi mereka, maka dia telah sesat dan menyesatkan, bahkan kejahatan mufti seperti ini lebih besar dibanding kejahatan seorang dokter yang mengobati semua orang dari latar belakang daerah, tabiat, situasi, dan tempat yang berbeda-beda dengan hanya berlandaskan pada suatu buku kedokteran. Dokter atau mufti yang bodoh

seperti demikian adalah orang yang paling berbahaya bagi agama dan kesehatan manusia.

Adapun Ibnu'Abidin, pernyataan-pernyataanya mengenai hal tersebut, terekam dalam suatu karyanya yang sangat monumental dan banyak dijadikan rujukan dalam diskursus dialektika fatwa dengan realitas sosial, salah satu pernyataannya yang sangat jelas yaitu:

ان جمود المفتي والقاضي على ظاهر المنقول مح ترك العرف والقرآن الواضحة والجهل يا حوال الناس يلزم منه تضيق كثيرة وظلم خلق كثيرين.

Artinya:

Kebekuan seorang mufti atau hakim dengan pendapat-pendapat ulama yang tertulis di berbagai buku-buku dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan tradisi masyarakat dan konteks-konteks sosial yang jelas dan tidak tahu tentang kondisi-kondisi masyarakat akan berakibat pada hilangnya hak-hak orang banyak dan terjadinya penganiayaan publik.

لوان رجلا حفظ جميع كتب اصحابنا لا بد من ان يتلمذ للفتوي حتى يهتدي اليها لان كثيرا من المسائل يجاب عنها على عادات اهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة.

Artinya:

Sekiranya ada seorang ulama yang telah menghafal semua kitab-kitab fiqhi suatu mazhab, maka tetap ia harus belajar berfatwa, sebab banyak masalah yang harus dijawab dengan mempertimbangkan tradisi-tradisi zaman dan tidak menyalahi ajaran syariah.

b. Fatwa harus bebas dari bias mazhab tertentu

Hal ini Imam Nawawi berkomentar:

ان كل احدر اى حديثا صحيحا قال حذامذنب الشافعى وانما حذا فيمن له ر تبت الاجتحداد فى المذنب وشرطه ان يغلب على ظنه ان الشافعى رحمه الله لم يقف على هذا الحديث اولم يعلم صحته.

Artinya:

Setiap orang yang menemukan hadis shahih, lalu ia mengatakan: kandungan hadis ini adalah mazhab Syafii, sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mencapai tingkatan mujtahid. Ini pun ia (*mujtahid*) boleh melakukannya kalau ia telah yakin bahwa hadis ini tidak diketahui adanya oleh Syafii atau dia tidak ketahui kesahihannya.

Ibnu Shalah juga berkomentar bahwa:

من وجد من الشافعيين حديثا يخالف مذهبه نظر فان كملت
الاتا لاجتهاد فيه اما مطلقا واما في ذلك الباب اوفى تلك المسألة على ما سبق
بينا انه كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وان لم تكمل التمهيد ووجد في
قلبه حرازة من مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفة فيه عنه جوابا
شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث امام مستقل فان وجدته فله ان يتمذهب
بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهبه اما
مه في ذلك.

Artinya:

Ulama siapa saja dari kalangan mazhab Syafii yang menemukan sebuah hadis yang bertentangan dengan mazhabnya, maka dia harus memperhatikan kode etik berikut; pertama, kalau ia seorang *mujtahid* apakah *mujtahid* mutlak, atau *mujtahid* pada bab fiqh yang dimaksud, maka ia berhak untuk mengikuti kandungan hadis itu. Kedua, bila mana ia bukan seorang *mujtahid* tapi ia menemukan kecenderungan dalam dirinya untuk meninggalkan hadis itu, setelah menemukan penelitian, tapi ia tidak menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab ulama yang tidak sepaham dengannya maka ia harus mencari apakah ada seorang *mujtahid* mengamalkan hadis itu atau tidak. Kalau ia menemukan ada seseorang *mujtahid* yang mengamalkannya maka ia boleh mengamalkan hadis itu dan ia dianggap punya uzur untuk meninggalkan mazhabnya.

- c. Teks *Qati'* dan *Mufti* tidak boleh menyatakan haram atau wajibnya sesuatu kecuali setelah mengadakan verifikasi dalil yang *Qati'i*

Makna dari kode etik ini adalah bahwa pendapat-pendapat ulama yang menjadi rujukan fatwa tidak boleh dinyatakan sebagai sebuah syariah yang bisa

mengesankan posisinya sebagai hukum yang harus dijalankan oleh umat setiap zaman dan tempat.¹¹

4. Urgensi Fatwa dalam Kehidupan Umat Islam.

Urgensi fatwa tidak terlepas dari seberapa jauh kemanfaatan fatwa dalam kehidupan umat manusia. Alquran dan Al-Hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Alquran dan hadis Rasulullah saw, masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanniy*.

Oleh karena karena itu, dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan (terutama masalah *fiqhiyah*) yang konkret dan bertanggung jawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum (yang berkaitan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam. Sehingga fatwa seharusnya mengandung beberapa unsur pokok:

1. Fatwa sebagai pengambilan keputusan syariat yang sedang diperselisihkan
2. Fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat di antara para ulama dan fatwa harus mempunyai konotasi kuat
3. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat.¹²

¹¹Abd.Rauf Aminn, *Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Publishing Yogyakarta, 2009), h. 105-117.

¹²Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* (Cet.I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 27.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Fatwa

Faktor-faktor yang seringkali mempengaruhi penentuan pendapat/fatwa adalah :

1. Perubahan sosio budaya: Perubahan sosial budaya sedikit banyaknya telah memberikan pengaruh terhadap penetapan fatwa. Hal ini dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah salah satunya karena perbedaan sosial budaya. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, karena tuntutan sosial akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di samping itu, perkembangan sosial budaya satu tempat dengan tempat lainnya tidaklah sama dengan kemajuan yang dialaminya.
2. Perkembangan pengetahuan modern: Faktor perkembangan pengetahuan modern sangat memberi warna pada penetapan fatwa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Banyak ilmu pengetahuan yang berkembang belakangan ini belum muncul pada masa para *mujtahid* fiqih merumuskan fatwanya.
3. Kebutuhan dan tuntutan zaman: Faktor lain yang turut memberi pengaruh terhadap penentuan fatwa adalah tuntutan zaman dan kebutuhan yang mengharuskan para pakar fikih kontemporer untuk memperhatikan kenyataan yang bertujuan untuk mempermudah serta memperingan hukum cabang (*hukum furu'*) yang bersifat operasional baik dalam perkara ibadah maupun muamalah.¹³

¹³Muhammad Shuhufi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 191.

4. Perubahan tempat: Fatwa bisa berubah karena perubahan tempat, sebagai contoh perbedaan situasi dan kondisi karena tempat. Misalnya orang Badui berbeda dengan orang yang berbudaya modern, situasi dan kondisi di desa berbeda dengan di kota. Perubahan fatwa Imam Syafi'I dari *qaul qadim* ketika tinggal di Irak kepada *qaul jadid* ketika tinggal di Mesir dapat menjadi bukti adanya perubahan hukum karena tempat.
5. Perubahan waktu: Yang dimaksud dengan perubahan waktu adalah perubahan waktu dari yang baik menjadi buruk atau yang disebut oleh ulama terdahulu dengan kerusakan waktu. Pada hakikatnya, waktu itu tidak rusak tapi manusianya. Oleh karena itu, perubahan waktu.
6. Perubahan tradisi: Para ulama terdahulu dari berbagai mazhab menegaskan bahwa hukum akan berubah seiring perubahan fatwa. Fatwa yang berdiri atas tradisi yang berubah tersebut tidak boleh berlaku lagi. Banyak perubahan tradisi dalam hal ekonomi, sosial dan politik, perubahan tersebut menyebabkan perubahan fatwa di era modern ini.
7. Perubahan kebutuhan manusia: Perubahan fatwa di pengaruhi oleh perubahan kebutuhan manusia. Banyak kebutuhan manusia dahulu berubah tingkat kebutuhannya pada zaman sekarang.
8. Musibah: Banyak peristiwa atau musibah seperti bencana alam yang mengharuskan sebuah aturan yang sudah diatur dalam syariat diabaikan untuk dijalankan karena kondisi darurat.¹⁴

¹⁴Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata), h. 181.

6. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma*, *qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sad al-zari'ah*.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.¹⁵

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istimbat* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istimbat* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa. Di

¹⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), h.4.

samping itu perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'uma* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. Pembentukan MUI bermula dari lokakarya Nasional bagi para da'i muslim tahun 1974. Dalam lokakarya telah disepakati untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia. Alasan normatif yang diajukan pemerintah mengenai perlunya pembentukan MUI adalah:

- a. Perlunya suatu wadah sebagai perekat bagi seluruh kaum muslimin.
- b. Perlunya mengikutsertakan bagi kalangan ulama dalam menyelesaikan masalah.

MUI berdiri pada tanggal 17 Jakarta sebagai hasil musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan

¹⁶Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press), h. 148.

keputusan No.28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh Letjen, H Soedirman dan tim penasehat yang terdiri atas Hamka, KH. Abdullah Syafe'I dan KH. M. Syukuri Gazali.

Pembentukan berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai bentuk piagam yang ditanda tangani oleh 53 orang Ulama yang terdiri atas 26 orang Ketua. Ketua Majelis Ulama Indonesia daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, Guppi, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan al-Ittihadiyah; empat orang Ulama dari Dinas Rohaniah Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang Ulama undangan perorangan. Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam konteks perjuangan nasional yang tercermin dalam tujuan program kerja antara lain sebagai berikut:

- a. Memantapkan, menguatkan dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.
- b. Memantapkan dan menguatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat.
- c. Memantapkan dan menguatkan kesadaran beragama untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
- d. Memantapkan dan menguatkan peranan ulama dalam mensukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat keseluruhannya.¹⁷

¹⁷Muh.Natsir, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam pembinaan umat (Perspektif Pemikiran Politik Islam)*, h. 101.

2. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam Berfatwa:

1. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.
2. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Teknik berfatwa yang dilakukan MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan di fatwakan.¹⁸

3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*Warasat al-Anbiyat*). Majelis Ulama Indonesia berperan menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Peran ini pula menjalankan fungsi MUI yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam.
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*), yakni Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Uhadim al-Ummat*) yakni Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntunan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat baik langsung maupun tidak

¹⁸Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, h. 145.

lansung akan bimbingan dan fatwa-fatwa dan berusaha senantiasa tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai penegak (*Amar ma'ruf*) dan nahi mungkar, yakni Majelis Ulama Indonesia berperan menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, MUI juga merupakan wadah perkhidmatan bagi para *muballig* untuk senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.
5. Sebagai penegak (*Amar ma'ruf nahi mungkar*), yakni Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan penuh hikmah dan istiqamah, dengan demikian MUI juga merupakan wadah perkhidmatan bertawakal bertaubat dan memperbaiki keadaan masyarakat dan berupaya dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas
6. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*Al-Tajdid*), yakni Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yakni gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
7. Sebagai pelopor gerakan *Ishlah*, yakni Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbuatan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *al-sam'u wal taufik* atau kompromi dan persesuaian dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat).

4. Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cindekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Vaksin Measles Rubella.

1. Gambaran Penyebaran Campak dan Rubella di Indonesia

Setiap tahun melalui kegiatan *surveilans* dilaporkan lebih dari 11.000 kasus suspek campak, dan hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan 12–39% di antaranya adalah campak, sedangkan 16–43% adalah *Rubella*. Dari tahun 2010 sampai 2015, diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus *Rubella*. Jumlah kasus ini diperkirakan masih lebih rendah, dibanding angka sebenarnya di lapangan, mengingat masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan, terutama dari pelayanan kesehatan swasta serta kelengkapan laporan yang masih rendah. Di Indonesia, *Rubella* merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya pencegahan efektif.

Data selama lima tahun terakhir menunjukan 70% kasus *Rubella* terjadi pada kelompok usia <15 tahun. Selain itu, berdasarkan studi tentang estimasi beban

¹⁹Muh.Natsir, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan Umat (Perspektif Pemikiran Politik Islam)*, h. 114.

penyakit CRS di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan terdapat 2.767 kasus CRS, 82/100.000 terjadi pada usia ibu 15-19 tahun dan menurun menjadi 47/100.000 pada usia ibu 40-44 tahun. Imunisasi massal Campak dan *Rubella* diberikan pada anak usia 9 bulan - kurang dari 15 tahun pada bulan Agustus di Sekolah dan September di Puskesmas, Posyandu dan Fasilitas Kesehatan.²⁰

2. Pengertian Vaksin Measles Rubella (MR)

Vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*) berupa serbuk kering dengan pelarut. Kemasan vaksin adalah 10 dosis per vial. Dengan pemberian imunisasi campak dan rubella dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat *pneumonia*, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan.²¹

Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa *pneumonia*, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.

Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, apabila *rubella* ini

²⁰Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Status Campak dan Rubella saat ini di Indonesia*”, www.kemendes.go.id. (Diakses 16 Mei 2019).

²¹Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI 2017, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)* (Cet.I; Kementerian Kesehatan), h. 14.

menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi *rubella* pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kogenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).²²

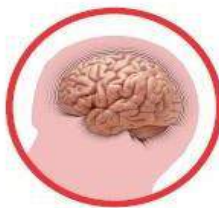
3. Bahaya dan Gejala Penyakit Campak dan Rubella

Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (*pneumonia*), radang otak (*ensefalitis*), kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. *Rubella* biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan. Penyakit campak (*measles*) menyebabkan:

1. Radang Paru (*Pneumonia*)
2. Radang Otak (*Ensefalitis*)
3. Kebutuhan
4. Gizi buruk
5. Diare
6. Bahkan kematian



Kelainan Jantung



Kerusakan jaringan otak



Katarak Kongenital



Gangguan pendengaran

Gambar 4.2 Bahaya penyakit Campak dan Rubella

²²Lihat Ketentuan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, *Tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella dari SII Serum Institute of India untuk Imunisasi*. h. 9.

Penyakit Rubella menyebabkan:

1. Kelainan Jantung
2. Kelainan Mata (Katarak Kongenital)
3. Tuli
4. Keterlambatan perkembangan
5. Kerusakan Jaringan Otak
6. *Retardasi mental*

Tidak ada pengobatan untuk penyakit *campak* dan *rubella*, namun penyakit ini dapat dicegah. Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk penyakit *campak* dan *rubella*. Satu vaksin mencegah dua penyakit sekaligus. Vaksin yang digunakan telah mendapat rekomendasi dari WHO dan izin edar dari Badan POM. vaksin MR 95 persen efektif untuk mencegah penyakit *campak* dan *rubella*. Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia. Gejala penyakit *campak* dan *rubella* adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit disertai dengan batuk, pilek dan merah. Gejala penyakit *rubella* tidak spesifik, bahkan bisa tanpa gejala. Gejala umum berupa demam ringan, pusing, pilek, mata merah, dan nyeri persendian, mirip gejala flu. Tidak ada efek samping dalam Imunisasi.²³

²³Soedjatmiko, "Jawaban Singkat Pertanyaan Seputar Imunisasi", *Indonesian Pediatric Society*, <http://www.idai.or.id/artikel/imunisasi/jawaban-singkat-pertanyaan-seputar-imunisasi>, (16 Mei 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.¹ Peneliti akan berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta memaparkan Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota

¹Nurhidayat Muh.Said, *Metode Penelitian Dakwah* (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2013), h. 37.

Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena akses tempat yang dapat dijangkau dengan mudah. Selain hal tersebut, di daerah ini banyak penduduk, dan banyaknya pro-kontra masyarakat dalam menanggapi Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella*, sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi tentang Persepsi Masyarakat terhadap Fatwa MUI mengenai penggunaan Vaksin *Measles Rubella*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah salah satu bagian dari cara kerja menyelesaikan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan objek yang dikaji. Dengan demikian dapat dirumuskan pendekatan ialah cara menghampiri sesuatu objek kajian, dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua konsep dasar, yaitu:

- a. Penggunaan teori-teori dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- b. Aspek formal dari objek yang dikaji.²

²Abd.Mui Salim,Mardan, dan Achmad, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'iy* (Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2009), h. 84.

Dalam penelitian mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teologis Normatif, adalah sebuah pendekatan yang memandang bahwa agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, yakni Alquran dan Hadis. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai sebuah kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersifat ideal.³
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat, dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanam kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.⁴
- c. Pendekatan Fenemonologis yaitu, suatu upaya untuk berusaha memahami tingkah laku setiap manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka bertindak.⁵

³Abdul Wahid Haddade, "Menakar Fatwa Keagamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012)", *Laporan Hasil Penelitian* (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2013), h. 37.

⁴Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 1.

⁵Syarifuddin Ondeng, *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 177.

C. Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena sifatnya adalah kajian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang dieliti. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar, Petugas Kesehatan Puskesmas Jumpandangbaru, dan Kepala KUA Kecamatan Tallo.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di Perpustakaan, Perusahaan, Kantor-kantor pemerintah.⁷ Data sekunder diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan sebagainya. Dalam sumber hukum sekunder dikenal bahan baku primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan rujukan dan juga buku-buku, sementara bahan buku sekundernya berasal dari informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikij.t.t. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

⁷Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* (Cet. I; Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), h. 11.

- c. Data tersier, menurut Soejono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁸

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu:

- a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki. Dengan mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar, Petugas Kesehatan Puskesmas Jumpandangbaru, dan Kepala KUA Kecamatan Tallo, yang di butuhkan untuk melaksanakan penelitian. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.⁹
- b. Wawancara (*Interview*), adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dicatat atau direkam dengan alat.¹⁰ Peneliti melakukan wawancara

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: t.t, 1984), h. 12.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 166.

¹⁰Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 67.

dengan narasumber yang terpercaya dan wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan kepada narasumber, hingga keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap penelitian.

- c. Dokumen, yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk laporan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.¹¹ Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara, adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
- b. Alat tulis menulis yaitu: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapat pada saat wawancara.
- c. Rekaman melalui handphone (*Recording*), berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan dan kamera untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak di analisis. Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

¹¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), h. 74.

dalam memecahkan masalah penelitian.¹² Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam teknik analisis data ini terdapat tiga komponen utama antara lain :

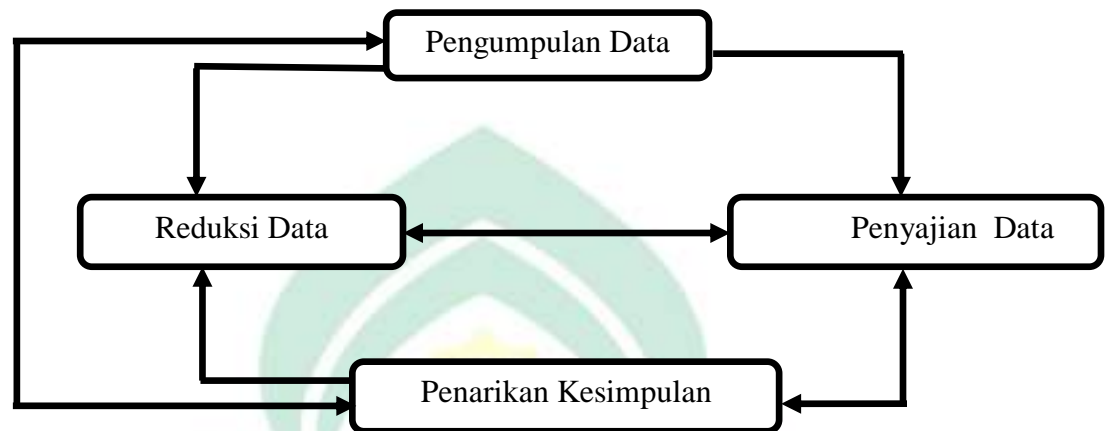
- a. Reduksi data, yaitu proses penyelesaian, penyederhanaan, dan abstraksi dari data yang diperoleh dan catatan tertulis yang terdapat dilapangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan abstraksi dari lokasi penelitian yang bersumber dari Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- b. Penyajian data, yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, kaitan kegiatan, dan tabel. Informasi berupa data yang peneliti dapatkan dari Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap selanjutnya.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian.

¹²Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. VI; Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 346.

¹³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104.

Untuk lebih jelasnya, maka penulis menyajikan dalam skema sebagai berikut:¹⁴

Bagan Teknik Analisis Data



¹⁴H.B Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2006, h. 113-116.

Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam, Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku.

Tabel 4.1 : Luas wilayah Kota Makassar

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)
1	Tamalanrea	31,84
2	Biringkanaya	48,22
3	Manggala	24,14
4	Panakkukang	17,05
5	Tallo	5,83
6	Ujung Tanah	5,94
7	Bontoala	2,10
8	Wajo	1,99
9	Ujung Pandang	2,63
10	Makassar	2,52
11	Rappocini	9,23
12	Tamalate	20,21
13	Mamajang	2,25
14	Mariso	1,82
	Total	175,77

Litbang Kompas diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2001

2. Orientasi Wilayah

Secara geografis kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir Pantai Barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" Bujur Timur dan 5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km² dengan batas-batas berikut :

- a. Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- b. Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Batas Timur : Kabupaten Maros
- d. Batas Barat : Selat Makassar

Tabel 4.2**Sebaran dan kepadatan penduduk**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	
		JUMLAH	KEPADATAN
1	Tamalanrea	82.641	2.596
2	Biringkanaya	96.057	1.992
3	Manggala	77.443	3.208
4	Panakkukang	124.861	7.323
5	Tallo	116.633	20.006
6	Ujung Tanah	44.373	7.470
7	Bontoala	57.406	27.336
8	Wajo	34.833	17.504
9	Ujung Pandang	27.254	10.363
10	Makassar	80.593	31.981
11	Rappocini	128.637	13.937
12	Tamalate	130.777	6.471
13	Mamajang	59.689	26.528
14	Mariso	51.491	28.292
	Total	1.112.688	6.330

Litbang Kompas diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2001

Secara keseluruhan kepadatan Kota Makassar sebesar 6.330 jiwa/km², namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu Tallo, Bontoala, Makassar, Mamajang dan Mariso yang kepadatan penduduknya

berada di atas 20.000 jiwa/km². Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Salah satunya adalah Kecamatan Tallo¹

3. Kecamatan Tallo

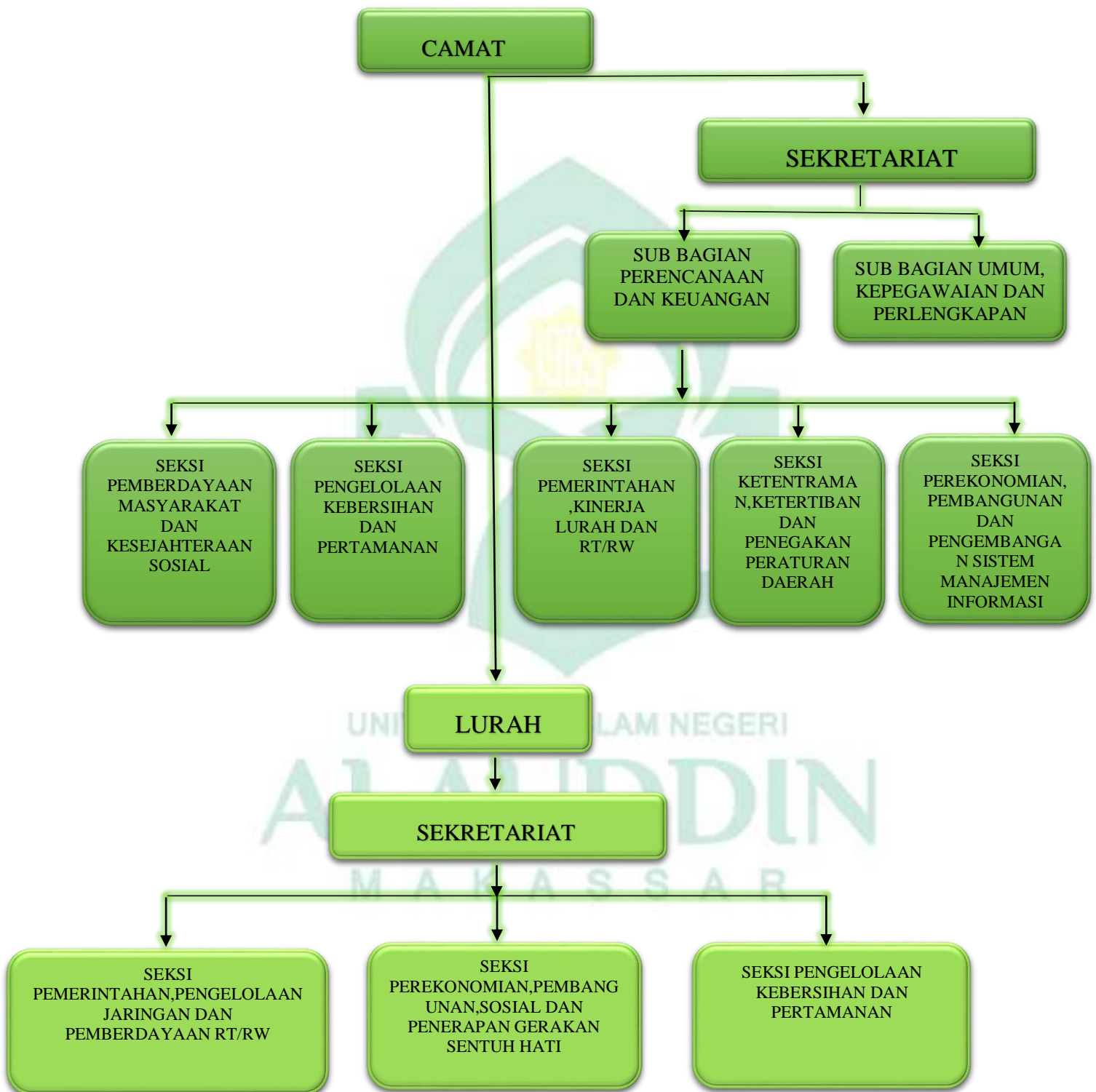
Kecamatan Tallo sebagai salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, mempunyai peranan penting dalam pengembangan di Kota Makassar. Dengan Luas + 8,75 km² merupakan kecamatan yang paling Utara di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk + 135.000 jiwa, 15 Kelurahan, serta 78 RW dan 467 RT dengan penduduk yang heterogen. Kecamatan Tallo mempunyai potensi yang besar, ditandai dengan adanya Makam Raja-raja Tallo, dan Makam Datuk Ribandang di Sinassara sebagai tanda awal berdirinya atau menyebar agama Islam pertama di Makassar sekitar tahun 1670-an, sebagai potensi pariwisata sejarah.

Kecamatan Tallo merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang terletak sebelah Utara Kota Makassar dengan pusat pemerintahan berada di kelurahan Ujungpandang Baru, yang berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah Utara, Kecamatan Tamalanrea di sebelah Timur, Kecamatan Bontoala sebelah Selatan dan Kecamatan Ujung tanah di sebelah Barat. Sebanyak 3 kelurahan di Kecamatan Tallo merupakan daerah Pantai dan 12 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan Pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Kecamatan Tallo tercatat memiliki luas wilayah sekitar 8,75 km² yang terdiri dari 15 Kelurahan.²

¹Profil Kabupaten/Kota, (*Laporan*), Makassar, (Studio 2004), h. 2.

²<http://KecamatanTallo.blogspot.com/2012/10/profil-kecamatan.html>, (6 Februari 2019)

Struktur Organisasi Kecamatan Tallo



Tabel 4.3 :

Luas areal jumlah RT/RW, RTG, dan penduduk Kecamatan Tallo

No.	Kelurahan	Luas (km ²)	RT	RW	JUMLAH RTG	PENDUDUK		
						L	P	JUMLAH
1	Bunga Eja Beru	0.30	31	5	2.581	4.846	5.118	9.964
2	Lembo	0.33	32	5	2.915	5.541	5.511	11.132
3	Kalukuang	0.41	26	5	1.311	2.596	2.577	5.173
4	La'Latang	0.46	28	4	1.046	1.820	1.891	3.711
5	Rappo Jawa	0.16	41	5	1.844	3.309	3.357	6.666
6	Tammua	0.92	27	6	2.459	5.022	4.960	9.982
7	Rappokalling	0.89	39	5	3.783	7.706	5.987	13.693
8	Wala-Walyya	0.11	37	5	2.047	3.439	3.517	6.956
9	Ujung Pandang Baru	0.41	19	5	1.135	1.880	1.847	3.727
10	Suangga	0.50	29	6	2.457	4.867	4.961	9.986
11	Pannampu	0.46	44	6	4.561	8.539	8.275	16.814
12	Kalukubodoa	0.89	51	7	5.201	7.975	9.255	17.230
13	Buloa	0.61	27	6	1.953	4.060	3.992	8.052
14	Tallo	0.61	26	5	2.064	5.008	4.936	9.944
15	Lakkang	1.65	8	2	261	486	958	1.444
	Jumlah	8.75	465	77	35.618	67.094	67.142	134.474

Data Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tallo 2017³

³Sumber Data: Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tallo (18 Februari 2019), h. 42

Tabel 4.4:
Data Sarana Kesehatan Se-Kecamatan Tallo

No.	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Postu	Posyandu
1	Bunga Eja Beru	-	-	-	6
2	Lembo	-	-	-	5
3	Kalukuang	-	-	-	5
4	La'Latang	-	-	-	4
5	Rappo Jawa	-	-	-	5
6	Tammua	-	-	-	6
7	Rappokalling	-	1	-	5
8	Wala-Walyya	-	-	-	5
9	Ujung Pandang Baru	-	1	-	5
10	Suangga	-	-	-	6
11	Pannampu	-	-	1	6
12	Kalukubodoa	-	1	-	7
13	Buloa	-	-	1	6
14	Tallo	-	-	-	5
15	Lakkang	-	-	1	2
	Jumlah	-	2	3	77

Data Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tallo 2017⁴

4. Visi dan Misi Kecamatan Tallo

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan

⁴Sumber Data: Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tallo (18 Februari 2019), h. 55.

dinamika pembangunan dari berbagai aspek, dengan memperhatikan visi Kota Makassar tahun 2014-2019 yaitu:

“Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua”

Untuk menjabarkan misi, Kecamatan Tallo dengan potensi wilayah yang di miliki maka dirumuskan visi Kecamatan Tallo 2014-2019 sebagai berikut :

“Mewujudkan Kecamatan Tallo sebagai pelayan publik yang ramah untuk semua ”⁵

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan keputusan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) yang merupakan produk dari *Serum Institute of India* (SII). Fatwa tersebut di tetapkan dan mulai berlaku 20 Agustus 2018. Isi dalam fatwa tersebut adalah :

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur Babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Vaksin *Measles Rubella* (MR) produk dari *Serum Institute of India* (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari Babi.
3. Penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) produk dari *Serum Institute of India* (SII) pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*).
 - b. Belum ditemukan vaksin *Measles Rubella* (MR) yang halal dan suci.

⁵Profil Kecamatan Tallo Kota Makassar tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah, (18 Februari 2019).

- c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
- d. Kebolehan penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal.

Bagi umat muslim belakangan ini, banyak yang menolak penggunaan vaksin *Measless Rubella*, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang ragu dan mempertanyakan hal tersebut, karena belum ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa mubah tentang penggunaan vaksin *Measless Rubella* (MR), polemik tentang halal dan haramnya vaksin ini menjadi isu di masyarakat. Pembicaraan mengenai halal dan haramnya vaksin *Measless Rubella*, mencuat ketika Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan program Imunisasi vaksin *Measless Rubella*, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018. Imunisasi tersebut ditujukan pada bayi yang berusia sembilan bulan sampai anak berusia 15 tahun, dan targetnya adalah sekitar 32 juta anak di 28 provinsi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penggunaan vaksin *Measless Rubella*, meskipun hal tersebut dinyatakan haram dan mengandung Babi, hal inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat Kota Makassar terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measless Rubella*, mengungkapkan persepsi yang berbeda-beda. Adapun hasil wawancara tentang persepsi masyarakat yaitu:

a. Masyarakat yang Pro dengan Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella.

Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Halimah umur 38 tahun, Ibu Rumah

Tangga mengungkapkan bahwa :

“Awalnya saya agak ragu, karena vaksin tersebut ada isu yang beredar, katanya mengandung minyak Babi, saya dengar dari mulut ke mulut. Masalah fatwa MUI saya setuju, kebetulan saya melihat di TV bahwa hal tersebut sebagai salah satu bentuk ikhtiar guna menjaga sistem kekebalan tubuh pada anak, makanya diperbolehkan, dan saya mengikut di situ, karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan mengeluarkan sebuah program seperti itu kalau memang tidak penting dan tidak mendesak, sepupu saya bilang bismillah saja, kan dengan Bismillah dengan menyebut nama Allah diserahkan semuanya kepada Allah, karena saya dulu awal-awalnya tidak ragu, setelah divaksin baru banyak argumen yang beredar di masyarakat, karena MUI belum mengeluarkan sertifikat halal tentang vaksin tersebut, sehingga saya berharap MUI segera mengeluarkan sertifikat halal untuk menjawab keresahan masyarakat.”⁶

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Hermin Jaya, umur 46 tahun, Wiraswasta menyatakan bahwa :

“Setuju dengan fatwa MUI, karena saya mengikut pemerintah, fatwa MUI yang dikeluarkan tentu sudah dipertimbangkan dan pasti ada manfaatnya. Sebelumnya saya sempat ragu karena masalah isu tersebut dan fatwa MUI yang dikeluarkan mengatakan bahwa vaksin *Measless Rubella* haram, namun diperbolehkan kendati mengandung Babi, namun saya beranggapan bahwa kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, maka itulah yang kami ikuti.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang pro terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella*, bahwa keputusan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk kemaslahatan dan menjaga sistem kekebalan tubuh anak, sehingga ketetapan dari pemerintah menjadi dasar dan hal yang harus

⁶Sitti Halimah, (umur 39 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kecamatan Tallo, 28 Januari 2019.

⁷Hermin Jaya, (umur 46 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Kecamatan Tallo, 28 Januari 2019.

di ikuti. Masyarakat meyakini bahwa apa yang dikeluarkan pemerintah tentu ada alasan yang baik untuk kemaslahatan.

b. Masyarakat yang Kontra terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella.

Wawancara bersama Ibu Kusrianti umur 35 tahun Honorer mengatakan bahwa:

“Saya pernah baca di koran bahwa bahan dari proses *Campak Rubella*, Campak dari embrio Ayam sedangkan Rubellanya itu memang ada unsur Babi, makanya itulah yang beredar di masyarakat, saya sendiri tidak mau memasukkan unsur-unsur Babi dalam tubuh anak saya, karena kan haram, tapi sebagian para ulama berpendapat bahwasanya tidak masalah karena salah satu bentuk ikhtiar dan kesehatan, akhirnya lama sebenarnya saya menghindari, saya tidak mau vaksin anak saya karena saya baca sendiri bahannya vaksin berasal dari India dan MUI sendiri belum mengeluarkan sertifikat halal. Saya bertentangan dan menolak karena itu fatwa dan di tambah saya baca dari koran apa bahan dasarnya. Saya sepakat jika dikeluarkan segera fatwa MUI bahwa halal, saya sudah memberikan vaksin anakku, dengan hasil penjelasan dari dokter. Dampak dari adanya fatwa MUI yang keluar baru-baru ini sangat mempengaruhi, apalagi kita agama Islam, jujur dari dulu saya juga sebetulnya ragu, karena kalau kita merasa ragu, kalau kita merasa ini ada syubhat lebih baik kita tinggalkan, karena itu bagian dari syaitan. Saya sangat memperhatikan aspek kehalalan vaksin tersebut.”⁸

Adapun hasil wawancara yang sedikit berbeda dengan wawancara informan yang lain yaitu Darmawati umur 39 tahun Ibu Rumah Tangga mengatakan bahwa:

“Saya harus diyakinkan dulu, apakah memang itu betul, apakah memang meyakinkan, karena yang saya tahu belum ada sertifikat halalnya. Kalau ada fatwa yang dikeluarkan bahwa vaksin ini halal baru saya bisa mengikuti program tersebut, karena saya butuh untuk diyakinkan, kalau memang halal baru saya mau. Banyak tidak mau karena ragu dan kurang yakin karena anggapan tadi, sehingga kami butuh untuk di yakinkan. banyak yang beredar isu dan fatwa MUI belum ada sertifikat halal, cuman ini yang masalah vaksin MR, yang membuat saya masih ragu karena haram tapi di perbolehkan jadi membuat kami tidak yakin. Kami tahu sebenarnya Dokter baik untuk kepentingan anak-anak, tapi di sisi lain kita juga takut, karena belum jelas fatwanya, apakah benar ini untuk kekebalan tubuh atau apa, kita ini kurang yakin.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang kontra terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles*

⁸Kusrianti , (umur 35 tahun), Honorer, *Wawancara*, Kecamatan Tallo, 27 Januari 2019.

⁹Darmawati, (umur 39 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Kecamatan Tallo, 30 Januari 2019.

Rubella, informan beralasan bahwa mereka ragu dan ingin diyakinkan apakah vaksin *Measles Rubella* tersebut aman, dan mereka menghawatirkan aspek halal tidaknya vaksin tersebut karena belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI pusat, sehingga masalah kehalalan vaksin merupakan salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk tidak memvaksinasi anaknya.

c. Persepsi Petugas Kesehatan dan Tokoh Masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella*.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurjannah salah satu Bidan (Petugas kesehatan) di Puskesmas Jumpandang Baru menyatakan bahwa:

“Tanggapan terhadap fatwa MUI, sebenarnya fatwahnya terlambat, duluan program kesehatan baru ada fatwa, timbul hoax dan timbul isu baru fatwa keluar, dalam fatwa tersebut mubah artinya tidak halal, tapi masyarakat tahunya mubah, artinya masyarakat tahunya itu Babi haram, maksudnya waktu sosialisasi juga harusnya yang sosialisasi itu bukan orang kesehatan saja, tapi dari Departemen Agama yang harus berkoar-koar juga, harusnya bekerja sama, sinkron antara MUI dengan keinginan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Hak dan Anak. Hak anak adalah Imunisasi, buktinya kan ditolak, orang tua tidak memberikan itu, jadi apa gunanya, baru sekolah juga tidak seratus persen mendukung, orang tuanya tidak mau. Program ini adalah perlindungan komunitas bukan hanya perorangan artinya kalau komunitas kelompok, kalau misalnya hanya sebagian kecil kelompok yang diimunisasi berarti lebih banyak yang tidak ,artinya kemungkinan untuk tetap itu penyakit ada.”¹⁰

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Irawati yang juga bekerja di Puskesmas Jumpandang Baru, mengatakan bahwa :

“Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measless Rubella* yang dikeluarkan MUI pada tanggal 20 Agustus 2018. MUI menyatakan bahwa vaksin MR boleh digunakan meski mengandung Babi, karena sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang halal dan suci sehingga menyebabkan kondisi keterpaksaan, tentunya berbagai respon masyarakat menanggapi hal tersebut, begitu juga dengan kami pihak kesehatan yang melaksanakan program Imunisasi vaksin MR, dimana respon masyarakat menutup diri untuk di berikan Imunisasi vaksin MR, alasannya berbagai macam takut, haram karena ada unsur Babi, hoax yang beredar di masyarakat, dan takut anaknya meninggal. Fatwa MUI terkait dengan vaksin MR ramai dibicarakan karena status halalnya, sementara penggunaan vaksin MR pada anak sangat penting untuk sistem kekebalan tubuhnya, efek

¹⁰Nurjannah, (umur 48 tahun), Bidan, Wawancara, Puskesmas Jumpandang Baru, 31 Januari 2019.

yang bisa ditimbulkan ketika anak tidak di vaksin antara lain: cacat anak bagi ibu yang hamil, tuli, bisul, bocor jantung dll.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi petugas kesehatan yang melaksanakan program Imunisasi vaksin *Measles Rubella* sangat berdampak pada masyarakat, banyak masyarakat yang menutup diri, dan menolak untuk memvaksinasi anaknya. Informan menjelaskan bahwa antara Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia harus bersinergi dalam mensosialisasikan program tersebut sehingga masyarakat yakin dan percaya.

Wawancara bersama bapak Sirajuddin, S.Ag, MA umur 45 tahun Tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Di liat dari segi mudaratnya, kalau tidak ada mudharatnya secara hukum, baik secara hukum agama, maupun UDD silahkan lakukan. Selama tidak ada mudaratnya bagi masyarakat, karena ini sudah ada fatwa MUI ya jalan saja, tapi kalau memang ada dampak negatifnya jangan, tinggalkan hal tersebut, kalau MUI sudah memfatwakan berarti kami harus kawal, artinya setuju tidak setuju namanya ulama yang bilang kita harus sami’na wata’na pasti ada landasannya, dasar hukumnya pasti ada dan sudah di teliti, dan ada biro hukumnya di sana. Wajib dilakukan apabila ada ketetapan dari pemerintah, kaidah fiqh yang berbunyi keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa persepsi tokoh masyarakat terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat, dengan demikian, berpijak dari ayat Alquran dan kaidah fiqh tersebut, masalah-masalah keagamaan yang mempunyai relasi dengan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah berhak ikut campur dan memutuskan.

¹¹Irawati, (umur 35 tahun”, Petugas Kesehatan, *Wawancara*, Puskesmas Jumpandang Baru, 31 Januari 2019.

¹²Sirajuddin, (umur 45 tahun), Kepala KUA Kecamatan Tallo , *Wawancara*, Jl.Teuku Umar, 25 Januari 2019.

Dalam menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan pertimbangan hukum dan berdasar kepada Alquran, Hadis, dan Kaidah fiqih, sehingga wajib untuk diikuti.

Kehalalan vaksin telah berakibat sejumlah anak dan orangtuanya menolak program vaksinasi oleh pemerintah, padahal dalam terminologi hukum Islam, dikenal kaidah fikih tentang darurat, sebagaimana seorang pengembara di padang pasir yang gersang dan panas, belum makan dan minum selama berhari-hari dan jiwanya terancam, ketika menemukan bangkai dan memakannya, dibolehkan untuk memakannya. Kehadiran ketentuan jaminan produk halal, merupakan kenyataan yang seharusnya disongsong sesuai dengan perspektif hukum Islam sebagai bagian dari *maslahat daruriyah* yang meliputi : memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Halalnya suatu produk berkaitan erat dengan upaya memelihara ajaran agama, sekaligus mengemban ketentuannya sehingga efek spiritual yang dibangun dalam sistem hukum Islam mengenai kehalalan suatu produk adalah bagian dari penerapannya bagi para konsumen.¹³

Kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai informasi berpengaruh dalam pembentukan persepsi di masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam mengakses media sosial atau berita online tentunya menambahkan informasi yang didapat. Salah satu topik yang menjadikan perdebatan pro dan kontra adalah penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR), karena didalamnya mengandung unsur haram (hewan Babi). Ditinjau dari komposisi vaksin *Measles Rubella* (MR) yang terdiri atas gelatin yang berasal dari kulit Babi dan Typsin yang berasal dari pankreas Babi, bahan lain yang berpeluang besar bersentuhan dengan Babi dalam proses produksinya yaitu *laktabumin hydrolysate*, serta terdapat pula bahan yang

¹³Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 88.

berasal dari tubuh manusia (*Human diploid cell*). Menurut fatwa MUI status penggunaan vaksin yang didalamnya terkandung unsur Babi dan turunanya hukumnya haram, namun bisa menjadi mubah (boleh) apabila dalam kondisi darurat dan terpaksa.

Hal ini tentunya dapat menimbulkan dilema pembenturan antara nilai agama dan kedaruratan dalam menangani kasus yang akan mengancam jiwa. Masyarakat awan resah karena menurut mereka segala sesuatu yang mengandung unsur Babi didalamnya adalah haram dalam kondisi apapun, serta banyak kemudian isu yang beredar di masyarakat, hoax tentang dampak pemberian vaksin. Fatwa MUI no. 33 tahun 2018 tentang kebolehan penggunaan Vaksin *Measles Rubella*, baru keluar pada Agustus 2018, setelah banyak masyarakat yang pro kontra dan meragukan kehalalan vaksin tersebut, sehingga hal inilah yang dinilai terlambat oleh masyarakat sehingga menolak untuk melakukan Imunisasi vaksin *Measles Rubella*.

Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan bahwa :

مَا أُبِيحَ لِضَّرُورَةٍ تُقَدَّرُ بِقَرَرِهَا

Artinya:

Sesuatu yang dibolehkan karena dirasakan sebagai darurat dibatasi sesuai dengan kadar kebutuhannya.

Allah swt mengecualikan keadaan darurat atau terpaksa dengan syarat orang yang dalam keadaan demikian tidak melampaui batas atau berlebihan. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* berkomentar bahwa orang baru dapat dikatakan terpaksa, apabila sampai pada tingkat kelaparan yang mengakibatkan kebinaasaan atau menyebabkan timbulnya penyakit yang dapat mengakibatkan kematian, baik ia sebagai orang yang taat maupun ahli maksiat. Kemudian orang yang terpaksa

hanya boleh memakan atau berobat dengan barang yang diharamkan dalam ukuran yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidupnya.¹⁴

بِقَدَارِهِ يُقَدَّرُ لِضَّرُورَةِ ابْيَاحِ مَا

Al-Quran juga menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:173, yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁵

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵

Dari ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat:

1. Bangkai : yang termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya (QS. Al- Maidah: 3).
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir (QS. Al-An'am : 145).
3. Daging Babi, kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan

¹⁴M. Gazali Suyuti, *Konsep Darurat dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Alauddin Press, Makassar, 2011), h. 168.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata* (Jakarta: Suara Agung Jakarta, 2013), h. 27.

tersebut, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai bahan bakunya.

4. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Menurut HAMKA, ini berarti juga binatang yang disembelih untuk yang selain Allah.¹⁶

Ayat di atas mengandung pengecualian pada keadaan darurat, untuk memelihara jiwa dari kebinasaan, dan ketika itu Allah tidak menoleh kepada sebab pengharaman, yaitu adanya kemudaratan. Al-Bazdawi dan ulama tafsir serta usul lainnya berkata, “Allah mengecualikan keadaan darurat, dan pengecualian dari pengharaman berarti membolehkan, karena pembicaraan menjadi pengungkap dari apa yang berada di balik yang dikecualikan dan sebelum diharamkan ia adalah mubah, lalu ia tetap pada posisi yang semula ketika dalam keadaan darurat.

Alquran telah menyatakan secara terang-terangan mengenai daruratnya lapar atau paceklik. Alquran membolehkan orang yang terpaksa memakan bangkai dan Babi, minum darah, minum khamar dan mengambil makanan orang lain, memakan makanan-makanan yang najis, dan air yang najis. Ketika menafsirkan ayat-ayat darurat, Abu Bakar al-Jasshash berkata “Allah telah menyebutkan darurat didalam ayat-ayat ini, dan dalam sebahagian ayatnya

Obat-obatan dan kosmetika tergolong belum banyak menerapkan sertifikasi halal dan label halal dari LPPOM MUI. Pendekatan obat-obatan sesuai rumusannya menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan

¹⁶Diana Candra Dewi, *Rahasia di Balik Makanan Haram* (Cet. I; UIN Malang Press, Malang, 2007), h. 62.

kontrasepsi manusia. Lebih memerhatikan aspek sehat dan aman bagi kebutuhan dan pemanfaatannya oleh manusia.

Keharaman suatu bahan pangan dapat disebabkan oleh karena bahan asalnya (Babi dan turunanya, binatang buas, bangkai), sifatnya (memabukkan), dan cara penyembelihan hewan halal (tidak mengikuti syariat Islam). Dari segi teknologi, titik kritis yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan makanan dan minuman halal ialah jenis dan asal bahan serta cara penyembelihan. Banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam masalah kehalalan produk-produk pangan. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat belum sejalan dengan perkembangan pemahaman hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ijtihad dalam masalah kehalalan produk pangan sangat dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam dalam masalah ini.

Di satu sisi, para ahli syariah Islam mungkin belum seluruhnya menyadari betapa kompleksnya produk pangan dewasa ini dimana asal usul bahan bisa melalui jalur yang berliku-liku, banyak jalur, bahkan dalam beberapa kasus, sulit ditentukan asal bahannya. Dengan demikian penentuan kehalalan suatu produk menjadi tidak mudah, memerlukan peran ilmuwan untuk menelusuri asal usul bahan dan proses pembuatannya. Di sisi lain, pemahaman para ilmuwan terhadap syariah Islam, ushul fikih dan metodologi penentuan halal haramnya suatu bahan pangan dari sisi syariah relatif minimal. Akibatnya, sering terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan kehalalan produk pangan. Dengan demikian seharusnya para ilmuwan muslim menggali kembali pengetahuannya, sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pengetahuan

tersebut akan membantu ilmuwan untuk bersama-sama ulama menentukan status kehalalan produk-produk pangan.¹⁷

Apakah keharaman bangkai dalam ayat-ayat tersebut berlaku hanya sebatas mengonsumsinya ataukah juga memanfaatkannya?

- a. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang diharamkan hanyalah mengonsumsinya. Dalil *“Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”* kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya, *“tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa.”* (Al-Baqarah : 173)
- b. Al- Jashshash : Selain haram mengonsumsinya, haram juga memanfaatkannya, kecuali jika ada dalil yang membolehkan untuk mengambil manfaat dari bangkai tersebut, karena Allah swt telah mengharamkan bangkai berikut wujudnya secara mutlak.
- c. Zhahiri : Melihat zhahir ayat tersebut, maka yang haram adalah dagingnya, bukan lemaknya.
- d. Jumhur : Selain dagingnya haram, lemaknya juga haram dan ini pendapat yang shahih, karena Allah dalam firman-Nya menyebutkan daging Babi itu semata menunjukkan keharaman bendanya, baik ia disembelih secara syar'i maupun tidak.

Adapun mengambil manfaat selain mengonsumsinya, para ulama berbeda pendapat:

1. Abu Hanifah dan Malik : Boleh mengambil manfaat dari kulitnya.
2. Asy- Syafi'I : Tidak boleh mengambil manfaat dari kulitnya.
3. Abu Yusuf : Makruh mengambil manfaat dari kulitnya.
4. Al-Qurthubi : Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharaman seluruh organ tubuh Babi, kecuali bulunya. Oleh karena itu seseorang

¹⁷Diana Candra Dewi, *Rahasia di Balik Makanan Haram*, h. 87.

diperbolehkan mengambil manfaat dari kulitnya. Rasulullah saw dalam hal ini juga tidak pernah melarangnya.¹⁸

Dalam ayat tersebut, Allah swt secara tegas menyatakan bahwa bangkai diharamkan untuk dimakan. Akan tetapi di akhir ayat tersebut, Allah memberikan peluang kepada manusia untuk memakan bangkai dalam keadaan terpaksa. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *dharurat*. Di antara ulama yang menjelaskan pengertian *dharurat* adalah Abu Bakar al- Jashash, al- Suyuthi, dan Muhammad Abu Zahrah.

خوف الضرار أو إهلاك النفس أو بعض الأجزاء بترك الأكل

“Kekhawatiran akan adanya kesulitan atau kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan bila tidak memakan (yang diharamkan).”

Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *dharurat* adalah:

الحواف إلى النفس من الإهلاك لما وضنا

“Kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa, baik secara meyakinkan (ilmu) maupun dugaan.”

Definisi yang dibuat oleh ulama di atas menunjukkan bahwa *dharurat* adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa atau anggota badan seseorang sehingga dia dibolehkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau memakan yang diharamkan.

Pendekatan bahwa obat atau kosmetika penting bagi kesehatan, dan diletakkan pada prinsip sehat dan aman digunakan, telah lama berkembang sebagai polemik yang terus-menerus terjadi dari waktu ke waktu seperti dalam pembetian Imunisasi campak bagi anak-anak. Proses pembuatan vaksin Polio Inaktif, virus Polio dan sebagainya acapkali diperdebatkan kehalalannya. Seperti halnya dengan

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata* (Jakarta: Suara Agung Jakarta, 2013), h. 27.

proses pembuatan vaksin Measles Rubella, sehingga terbitlah fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal yang menyatakan bahwa:

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Vaksin MR produk dari *Serum Institute of India* (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari Babi.
3. Penggunaan vaksin MR produk dari *Serum Institute of India* (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (dilarurat syar'iyyah)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.¹⁹

C. Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella

Kata *masalah* berakar pada *s-l-h*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata *masalah* satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa'ah*) telah di-Indonesiasikan menjadi maslahat dan manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti

¹⁹Lihat Ketentuan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, *Tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella dari SII Serum Intitute of India untuk Imunisasi*. h. 11.

kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah

Secara terminologis, *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa/diri, pemeliharaan kehormatan serta keturunan, pemeliharaan akal budi, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan.²⁰

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau al-Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma.²¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah, setiap illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maslahah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di

²⁰Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013), h. 127.

²¹Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi I (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 139.

akhirat.²² Para ahli Ushul Fiqih mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara’

- a. *Maslahah al-Mu’tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’ maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah al-Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’.
- c. *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil-dalil yang rinci.

Tingkatan-Tingkatan Masalah Mursalah

Para ahli Ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Sementara Hamka Haq dalam bukunya Falsafat Ushul Fiqih mengemukakan bahwa terdapat 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat diantaranya, (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, (5) memelihara keturunan dan (6) memelihara harta benda. Aspek tersebut diurut berdasarkan prioritas urgensinya. Kemaslahatan dalam setiap aspek dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:

1. *Maslahah Dharuriyah*, yaitu segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.

²²Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2016), h. 206.

2. *Maslahah Hajiyyah*, yaitu segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan.
3. *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.²³

Perlindungan terhadap kemaslahatan yang berada pada posisi yang lebih tinggi harus didahulukan dari pada perlindungan terhadap kemaslahatan yang berada di bawahnya. Berdasar pada urutan tersebut perlindungan masalah yang pertama (agama) harus ditegakkan meskipun harus mengorbankan jenis masalah yang ada di bawahnya. Seperti halnya dengan penegakan masalah urutan kedua (perlindungan jiwa) harus diupayakan penerapannya bahkan sampai pada batas-batas menafikan masalah di bawahnya. Contohnya diperbolehkan meminum khamr yang sesungguhnya dapat menyumbat berfungsinya akal (masalah urutan ketiga), dalam kondisi tertentu di mana pemeliharaan jiwa (urutan masalah kedua) terancam.

Polemik mengenai haram atau tidaknya vaksin *Measless Rubella*, tentunya mengakibatkan sejumlah orang tua tidak bersedia anak mereka diberikan imunisasi dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu dan tidak memiliki sertifikat halal. Program tersebut adalah perlindungan komunitas bukan hanya perorangan tetapi komunitas kelompok, sehingga apabila hanya sebagian kecil kelompok yang diimunisasi berarti lebih banyak yang tidak , artinya kemungkinan penyakit tersebut tetap ada. Pemerintah menggalakkan program tersebut untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Beberapa pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa

²³Gazali Suyuti, *Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahatt Mursalah* (Cet. I;Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 176.

Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella dari SII *Serum Intitute of India* untuk Imunisasi yakni:

- a. Bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit *Campak* dan *Rubella* di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui Imunisasi.
- b. Bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.²⁴

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^{١٩٥}

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²⁵

²⁴Lihat Ketentuan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, *Tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella dari SII Serum Intitute of India untuk Imunisasi*. h. 1.

²⁵Kementerian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 60.

Surah An-Nisa ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²⁶

Surah Al-Baqarah/2 ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁷

Surah Al-Baqarah/2 ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

Surah Al-An'am ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ١١٩

²⁶ Kementerian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 112.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 80.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 123.

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.²⁹

Adapun persyaratan-persyaratan masalah mursalah menurut al-Syathibi, yang mana persyaratan-persyaratan tersebut dipertegas lagi oleh ulama yang datang kemudian seperti Abd al-Wahab Khallaf antara lain:

- a. *Al-maslahah al-Mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dali-dalil *juz'i* yang *qat'i* yang wuruld dan dalalah-nya.
- b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Esensi dari maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dalam hal fatwa MUI tentang Imunisasi vaksin *Measles Rubella* sangat menarik sekali jika ditinjau dari aspek kaidah fiqih masalah mursalah agar nantinya didalam kehidupan serta pemberlakuan hukumnya didalam masyarakat tidak ada lagi keraguan didalamnya. Dikeluarkannya fatwa MUI No 33 Tahun 2018 ini bertujuan agar tidak adanya lagi kesimpang siuran informasi yang berada di masyarakat terkait vaksin imunisasi, banyak isi yang beredar di masyarakat terkait dengan status vaksin *Measles Rubella*.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 235.

Namun semua dijelaskan didalam fatwa MUI No 33 Tahun 2018 bahwasanya ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. MUI bekerja sama dengan BPPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam pembagian masalah itu ada masalah dari segi tingkatannya yakni: *maslahat Daruriyat*, ini merupakan pokok pembahasan masalah ini sebagai pokok acuan dasar tegaknya kehidupan asasi manusia.

Hukum Islam datang sebagai solusi bagi umat Islam, hukum Islam adalah hukum yang dinamis, fleksibel dan elastis. Hukum Islam sebagai rahmatan lil'alam, Islam hadir dengan memberikan segala kemudahan salah satu dalil yang menerangkan bahwa Allah tidak menyusahkan hambanya dalam melaksanakan perintahnya firman Allah SWT sebagai berikut:³⁰

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya :

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Hukum Islam merupakan ilmu yang merupakan isinya menyangkut garis besar mengenai syariat Islam terdapat beberapa hukum Islam yang mengurus mengenai masalah perilaku manusia baik itu dalam perbuatan maupun perkataan dari manusia sendiri. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam dijelaskan secara tegas dan langsung dan adakalanya juga dijelaskan secara samar-samar. Adapun hukum yang berbentuk perintah dan larangan itu baik yang berbentuk teks maupun yang berbentuk teks syari'at merupakan sesuatu yang bermakna.

Namun semua itu ada maksud dan tujuan dalam penyampaiannya. Oleh karena itu para ulama menamakan itu *maqashid al-syariah*. Tujuan utama dari

³⁰ Kemeterian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 49.

maqashid syariah adalah menjadi tiga karakter hukum Islam, yaitu *al dharuriat* (kebutuhan primer), *al hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Dari ketiga tujuan utama tadi bahwasanya tidak terjadi kepentapan hukum itu kecuali menjaga kebutuhan primer, sekunder dan tersier sebagai pelengkap.

Syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya, berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Syatibi berkata “Sesungguhnya penetapan berbagai ketetapan hukum syaria’at itu tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan hamba Allah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang”. Islam telah mengharamkan segala kemudharatan, keburukan dan kebinasaan. Islam juga melarang setiap tindakan yang menimbulkan mudarat bagi tubuh dan akal manusia.

Imam al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Dari definisi tersebut, adakalanya masyarakat Islam menghadapi kasus atau peristiwa, lantas para mujtahid mencoba untuk mengetahui ketetapan hukum syara’nya, lalu mereka mencari pada sumber-sumber pokok syariat, yaitu Alquran dan Al-Sunnah. Dalam pencarian mereka tidak menemukan kasus yang sebanding atau serupa dengan sifat yang sesuai, yang darinya patut dijadikan landasan ketetapan hukum. Mereka hanya dapat menangkap sifat yang menghendaki bagi ketetapan hukum syara’ ini sesuai dengan tujuan-tujuan syara’ serta jiwanya yang umum dengan maksud untuk menciptakan kebaikan dan manfaat bagi manusia, serta menghindari mereka dari kemudharatan dan keburukan.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Para ulama

sepakat, bahwa harus ada ketetapan hukum dari sebuah peristiwa baru, apabila ketetapan hukum tersebut menciptakan kemaslahatan vital bagi kehidupan manusia, mengingat hubungannya yang sangat erat dengan hal-hal tersebut di atas, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Ketetapan hukum tersebut diterima tanpa ragu dipandang sebagai ketetapan hukum yang Islami dan benar.³¹

Kaedah fiqih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudaratan itu dihapuskan

Perkara yang semula diharamkan oleh syariat, tetapi karena perkara itu sangat dihindarkan oleh manusia untuk meringankan malapetaka yang melanda padanya, atau perkara yang semula dimaksudkan, tetapi dibutuhkan oleh manusia untuk sementara waktu selama keadaan darurat dan kebutuhan itu masih berlaku. Kaidah ini mengandung arti bahwa keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'. Semua yang dilarang dalam Islam, selain kufur, zina, dan membunuh, dibolehkan melakukannya ketika darurat, dengan syarat tidak menempatkannya sebagai hal yang dibolehkan atau untuk bersenang-senang. Jadi orang yang dalam keadaan terpaksa, hanya dibolehkan memakan yang haram sekedar untuk menghindari hal yang tidak baik dan menyakitkan.

Kaidah tersebut di atas dipahami dari firman Allah swt, dalam QS. Al-An'am 6:119:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.

Demikian pula sabda Rasulullah saw:

³¹M. Gazali Suyuti, *Konsep Darurat dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Alauddin Press, Makassar, 2011), h. 99-100.

لَا ضَرَّ وَلَا نَفْعَ

Artinya:

Tidak ada kemudarat dan tidak boleh pada memudaratkan orang lain.

Darurat dalam arti sempit adalah keadaan yang menyelimuti manusia dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, yang kondisi itu mendorongnya melakukan yang diharamkan dan dilarang dalam syara, guna memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah atau untuk menghindari hal yang menyakitkan, baik itu secara yakin, atau diduga demikian. Berpegang dengan kaidah darurat dalam beberapa keadaan yang dikecualikan untuk membolehkan yang diharamkan itu merupakan dalil bahwa Islam memperhitungkan kenyataan dan kelemahan yang terdapat pada diri manusia serta tuntutan-tuntutan yang dihadapinya.

Kebolehan yang dimaksud adalah secara global adalah penghapusan dosa dan siksaan ukhrawi di sisi Allah swt. Dalam keadaan darurat pengobatan, dibolehkan untuk menggunakan vaksin *Measles Rubella* karena adanya kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iiyyah*), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.³²

³²M. Gazali Suyuti, *Konsep Darurat dalam Al-Qur'an*, h. 134-136.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Persepsi masyarakat yang pro terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella*, meyakini bahwa apa yang dikeluarkan pemerintah tentu ada alasan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang kontra, beralasan bahwa mereka ragu dan menghawatirkan aspek halal tidaknya vaksin tersebut, sedangkan persepsi petugas kesehatan yang melaksanakan program Imunisasi vaksin *Measles Rubella*, sangat berdampak di masyarakat, banyak masyarakat yang menutup diri, dan menolak untuk memvaksinasi anaknya, di sisi lain persepsi tokoh masyarakat meyakini bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat, dengan berpijak dari ayat Alquran dan kaidah fiqh.
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah, setiap illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*Al-maslahah*). Metode istinbat digunakan MUI dalam memutuskan fatwa hukum penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah metode penetapan hukum yang berdasarkan maslahat. Adapun kemaslahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah menjaga jiwa, yang menjadi salah satu dari lima komponen tujuan

tercapainya syariat (*Ad-daruriyyat al-khams*). MUI mempertimbangkan di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyariatkannya hukum Islam. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Para ulama sepakat, bahwa harus ada ketetapan hukum dari sebuah peristiwa baru, apabila ketetapan hukum tersebut menciptakan kemaslahatan vital bagi kehidupan manusia, mengingat hubungannya yang sangat erat dengan hal-hal tersebut di atas, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Ketetapan hukum tersebut diterima tanpa ragu dipandang sebagai ketetapan hukum yang Islami dan benar.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan implikasinya sebagai berikut:

1. Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) yang merupakan produk dari *Serum Institute of India* (SII), secara langsung memberikan pengaruh serta menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat dalam memberikan vaksin *Measles Rubella* (MR) pada anak-anak mereka.
2. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bertujuan demi kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Namun perlu adanya kejelasan hukum mengenai penggunaan vaksin *Measles Rubella*, sehingga masyarakat tidak ragu dan mempersoalkan kehalalan vaksin tersebut, serta perlunya upaya pemerintah untuk menemukan vaksin yang halal, sehingga tidak ada pro kontra yang terjadi di masyarakat. Selain hal tersebut antara Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia harus bersinergi dalam

mensosialisasikan program Imunisasi vaksin *Measles Rubella*, secara massif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat yakin dan percaya, dan peningkatan di semua lini dengan memanfaatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR). Penelitian ini hanya terbatas pada persepsi masyarakat dan analisis Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah, semoga peneliti berikutnya dapat mengembangkan pada bidang-bidang yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Beni dan Saebeni. *Sosiologi Hukum*, Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikij.t.t. *Pengantar Metode Peneltian Hukum*.
- Anis, Ibrahim (at. al). *Al-Mu'jam al-Wasieth*, Juz II, Cet. II; Cairo: Dar al-Maarif, 1973.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013.
- Candra Dewi Diana, *Rahasia di Balik Makanan Haram*. Cet. I; UIN Malng Press, Malang, 2007.
- Kementerian Agama. *Al-Hidayah Al-Our'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: Penerbit Kalim, 2010.
- Desideria Benedikta. *Fatwa MUI Soal Vaksin MR Hapus Keraguan Masyarakat untuk Imunisasi*” (Liputan), <https://www.liputan6.com/health/read/3626104/fatwa-mui-soal-vaksin-mr-hapus-keraguan-masyarakat-untuk-imunisasi>, 15 Mei 2019.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI 2017, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*. Cet.I; Kementrian Kesehatan.
- Al-Fayumi, Ibrahim. *Qamus al-Munir*, Cet. I; Kairo: Dar al- Syuruq, 1991.
- Haddade, Abdul Wahid. *Kode Etik Berfatwa: Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- , *Menakar Fatwa Keagamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012)*”, *Laporan Hasil Penelitian* (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2013.
- Hamidy, Mu'amal. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

- Hussein Sakr Ahmad, *Menyingkap Produk-produk haram Berbagai Kerancuan dan Kenyataan* (Wahana Cendekia, Yogyakarta).
- Indriani Dice. Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Karim, Zaidan Abdul. *Usul al-Da'wah*, Cet.III; 1976.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Status Campak dan Rubella saat ini di Indonesia*, www.kemendes.go.id. Diakses 16 Mei 2019.
- Kemeterian Agama RI. *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta:UIN Press, 2013).
- Ketentuan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, *Tentang Penggunaan Vaksin Measless Rubella dari SII Serum Intitute of India untuk Imunisasi*.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- M.Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Edisi I, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi al-Lughah wa Al-A'lam*, Cet. XXIX; Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.
- Muh.Said, Nurhidayat. *Metode Penelitian Dakwah*, Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2013.
- Muhammad bin Mansur, Abu al-Fadl. *Lisan al-'Arab*, Cet. II; Beirut: Dar al-Shadir, 1999.
- Munajat, Makhrus. *Imunisasi menurut kajian MUI* (Seminar Nasional yang disajikan di Fakultas Kedokteran UIN Yogyakarta, 14 Oktober 2017).
- Musyahid, Achmad. *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, Cet.I ; Alauddin University Press, 2012.
- Natsir, Muh. *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pembinaan Umat Perspektif Pemikiran Politik Islam I*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet. VI; Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ondeng, Syarifuddin. *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XII; Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2016.
- Rahmawati. *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Cet. I; Yogyakarta, 2015.
- Rauf Amin, Abd. *Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Publishing Yogyakarta, 2009.
- Rohadi, Abdul Fatah. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Salim Mardan, Abd. Mui, dan Achmad. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'iy*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Sarwono, Jonathan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Cet. I; Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Shuhufi, Muhammad. *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
- , *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Soedjatmiko. Jawaban Singkat Pertanyaan Seputar Imunisasi. *Indonesian Pediatric Society*, <http://www.idai.or.id/artikel/imunisasi/jawaban-singkat-pertanyaan-seputar-imunisasi>, 16 Mei 2019.

- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: t.t, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.
- Sunaryo. *Sosiologi*, Cet. I; Jakarta: Bumi Medika, 2015.
- Sutopo. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2006.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Suyuti, Gazali. *Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahatt Mursalah*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Suyuti M. Gazali, *Konsep Darurat dalam Al-Qur'an*. Cet. I; Alauddin Press, Makassar, 2011.



The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a green geometric emblem. It features a central yellow star with Arabic calligraphy, surrounded by green lines that form a stylized arch or dome shape. The entire logo is centered on the page.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Wawancara dengan Bapak Sirajuddin, Kepala KUA Kecamatan Tallo



Wawancara dengan Ibu Nurjannah, salah satu pelaksana Imunisasi Vaksin Measles Rubella di Puskesmas Jumpandang Baru



Wawancara dengan Ibu Irawati salah satu pelaksana Imunisasi Vaksin Measles Rubella di Puskesmas Jumpandang Baru



Wawancara dengan Ibu Kusrianti umur 35 tahun, Honorer



Wawancara dengan Ibu Darmawati, umur 39 tahun Ibu Rumah Tangga.



Wawancara dengan Ibu Masrurah, umur 35 tahun Wiraswasta.



Wawancara dengan Ibu Sitti Halimah umur 38 tahun Ibu Rumah Tangga.



Wawancara dengan Hermin Jaya, (umur 46 tahun), Wiraswasta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap orang tua yang masih banyak meragukan keamanan vaksin Measles Rubella?
2. Apa pentingnya pemberian vaksin Measles Rubella bagi anak, dan bagaimana keamanan vaksin Measles Rubella?
3. Apakah bapak/ibu sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau di sekolah tentang vaksin Measles Rubella?
4. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian vaksin Measles Rubella?
5. Apa dampak yang ditimbulkan ketika orang tua menolak untuk memberikan imunisasi vaksin Measles Rubella?
6. Apakah selama program imunisasi yang dijalankan oleh puskesmas ini ada penolakan dari orang tua anak yang menolak untuk di berikan vaksin Measles Rubella dan apa alasannya?
7. Apa langkah yang di ambil pihak kesehatan, ketika masih ada orang tua atau masyarakat yang menolak untuk divaksin Measles Rubella?
8. Selama tahun 2017 sampai sekarang, berapa kasus anak yang diduga terjangkit virus campak dan rubella?
9. Penyakit apa yang bisa timbul ketika anak tidak di berikan vaksin Measles Rubella?
10. Bagaimana efek samping yang ditimbulkan terhadap pemberian vaksin Measles Rubella?
11. Sudah berapa persen cakupan vaksin Measles Rubella di wilayah ini?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/Ibu memberikan imunisasi vaksin Measles Rubella kepada anak-anak bapak/Ibu?
2. Apakah bapak/Ibu setuju terhadap program pemerintah untuk vaksin Measles Rubella?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin Measles Rubella?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Fatwa MUI yang baru-baru ini di keluarkan bahwa vaksin Measles Rubella haram,namun di perbolehkan karena belum ditemukan vaksin yang halal?
5. Apakah setelah dikeluarkannya fatwa MUI No.33 Tahun 2018 bahwa Vaksin Measles Rubella haram tapi diperbolehkan atau mubah,Bapak/Ibu masih tetap ingin memberikan Vaksin MR?
6. Apakah masalah kehalalan vaksin Measles Rubella menjadi salah satu pertimbangan Bapak/ibu memutuskan untuk memvaksinasi atau tidak memvaksinasi anak ibu?
7. Apakah bapak/ibu menghawatirkan aspek halal tidaknya vaksin Measles Rubella?
8. Apakah bapak/ibu sempat ragu untuk memberikan vaksin Measles Rubella?
9. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella ?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan MUI membolehkan vaksin Measles Rubella meskipun vaksin tersebut mengandung babi?
2. Apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan produksi vaksin halal demi kepentingan imunisasi bagi masyarakat?
3. Apakah MUI memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memberikan vaksin Measles Rubella pada anaknya?
4. Bagaimana pandangan bapak/Ibu terhadap polemik perlu tidaknya vaksin atau halal tidaknya penggunaan vaksin Measles Rubella?
5. Apa maksud utama dikeluarkannya fatwa nomor 33 tentang vaksin MR?
6. Apakah MUI melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh pemuda atau pihak lainnya untuk mengkampanyekan pelaksanaan imunisasi vaksin Measles Rubella?
7. Apakah MUI telah mendorong pemerintah untuk harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dan imunisasi dalam pengobatan?
8. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella?



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mulpusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang

PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi;
 - b. bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran al-Karim

- a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195

- b. Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

- c. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

....وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ...

.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am : 119)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ" (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" (رواه البخاري)

Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. al-Bukhari).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ ... (رواه البخارى).

Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda): "Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat" ... (HR. al- Bukhari).

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاهُ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak takdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah takdir Allah" (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaidah-Kaidah fiqh:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya"

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَ مَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa’id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu’* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat – dengan benda najis itu’.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقُومُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبِيِّينَ بِشُرْبِ أَنْبَوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ

لِلتَّدَاوِي ، وَهُوَ جَائِزٌ بِصَرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr"

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat :

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجَسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعْلَظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَقَالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخَنَزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوَّلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجَسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan

menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَحَنِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِثْفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ
مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى
النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصْلٌ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا، ... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكَوْنِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةِ عَنْ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْبَبَّاتِ

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai berikut:

تعريف الضرورة وحكمها: هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً. فلا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت , و إنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً

Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.

10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan.
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiyah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
14. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai pedoman.
15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk

melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan

16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:

- a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
- b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
- c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.

17. Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018 yang antara lain:

- a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.
- b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).
- c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi

lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.

- d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 : jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.
- e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella
- f. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.
- g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksi MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.

18. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIP, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di

Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dlarurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya **haram**.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, **dibolehkan (*mubah*)** karena :
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA

DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui:

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

RIWAYAT HIDUP



Nur khaera di lahirkan di Soppeng, 10 April 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, buah hati dari Ayahanda Drs. H. Abd Muis dan Ibunda Hj Hasnah. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Perguruan Islam Ganra pada tahun 2002-2003, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 77 Ganra I, pada tahun 2003-2009, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Perguruan Islam Ganra pada tahun 2009-2012, dan pada tahun tersebut, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Watansoppeng hingga tahun 2015.

Hingga pada akhirnya penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Selama kuliah penulis sempat aktif dalam organisasi internal sebagai Ketua bidang Pendidikan dan Penalaran, Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, selain itu penulis juga aktif di Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) sebagai Ketua bidang III Pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R